



JOGJAKARTA

Tak Ada Kuota, Masih Ada Kesempatan Akses

Bantuan Produktif Usaha Mikro

Terbuka untuk UMKM

Masih ada kesempatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mengakses bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat. Bantuan sosial ini bertujuan membantu memperkuat modal usaha agar mampu bertahan pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

KEPALA Bidang Usaha Kecil Mikro, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja Bebasari Sitarini mengatakan, batas waktu pengajuan berkas data dan persyaratan atau pendaftaran sampai tanggal 10 September. "Bisa *Whatsapp* call center kami di nomor 0896-2355-9300 sesuai jam kerja. Atau bisa lewat *link* dinas untuk mengakses bantuan," katanya saat konferensi pers di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (3/9).

Sita menjelaskan, nilai bantuan hibah yang telah diluncurkan sejak 24 Agustus dengan alokasi anggaran Rp 22 triliun itu sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro. Dengan kuota 12 juta pelaku UMKM se-nasional. Dengan target itu UMKM di Kota Jogja yang sudah mendaftar sekitar 6.900 dari total 26 ribu pelaku UMKM.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.232 pelaku UMKM di antaranya lolos verifikasi kota dan provinsi. Selanjutnya dari provinsi akan diusulkan ke pusat dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Koperasi dan UKM. "Dan berhak dapat tidaknya dari kementerian. Tidak ada kuota per kabupaten kota atau provinsi. Sebaiknya banyaknya kalau bisa," ujarnya.

Kriteria calon penerima bantuan di antaranya memiliki kegiatan usaha mikro, di mana memiliki nilai takaran sendiri kekayaan maksimal Rp 50 juta dan penghasilan maksimal Rp 300 juta per tahun. Ber KTP Kota Jogja dengan mengantongi izin usaha mikro (IUM), tidak sedang mengakses kredit pinjaman modal dari perbankan atau lembaga pembiayaan lain. Serta memiliki rekening bank di bank umum. Dan bukan ASN, TNI/Polri, BUMN atau BUMD. "Ada yang tidak lolos verifikasi dan data dikembalikan ke kami," ucapnya.

Ada beberapa data dikembalikan ke pemerintah kota karena tidak lolos verifikasi lantaran ada berbagai faktor. Antara lain data tidak valid, tidak memiliki IUM, di antaranya sedang mengakses perbankan. Selain itu tidak menuliskan nomor kontak yang dapat dihubungi. "Kalau yang tidak lolos ini boleh lagi mengajukan, tapi dilengkapi dulu sesuai syarat yang ada," jelas Bebasari.

	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.		
5.		

Yogyakarta,
Kepala



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005